

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan (Waluyo, 2005). Salah satu usaha mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak (Trisnayanti dan Jati, 2015). Pajak merupakan pendapatan Negara yang cukup potensial untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Menurut P.J.A Adriani (dalam Sukardji, 2002) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

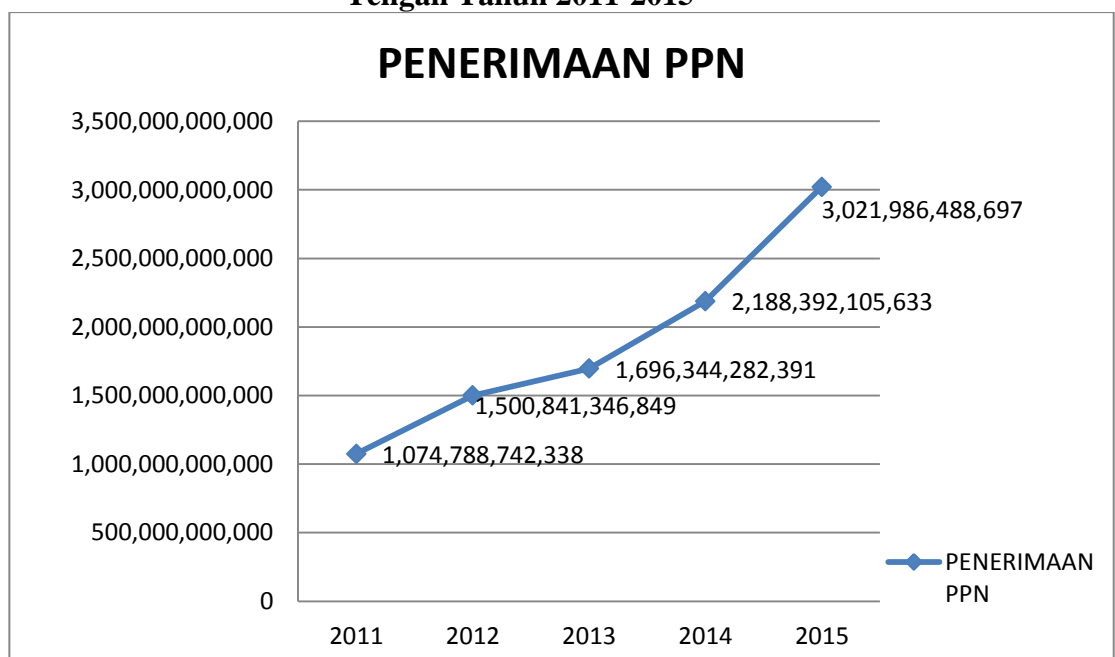
Dalam mendukung pembangunan nasional, pajak dapat dilaksanakan dengan prinsip kemandirian sesuai dengan sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia yaitu *self assessment system* dimana wajib pajak bertanggung jawab penuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Pemberian kesempatan serta wewenang kepada wajib pajak untuk melaksanakan

perpajakannya melalui *self assessment system* ini diharapkan semakin meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sehingga meningkatkan penerimaan Negara, dimana keadaan perekonomian Negara Indonesia masih dalam taraf yang belum dapat dikatakan baik (Supit et al, 2014). Besarnya manfaat pajak dalam membiayai pemerintahan, terlihat dari besarnya penerimaan Negara dari sektor pajak, dibanding sektor lainnya, walaupun pada kenyataannya target pajak dari tahun ke tahun tidak pernah tercapai 100% (Handayani dan Naniek, 2016).

Salah satu pajak yang berpengaruh terhadap pendapatan suatu Negara adalah Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai mulai diperkenalkan di Indonesia sejak April 1985 untuk menggantikan Pajak Penjualan (PPn). Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak dikenakan PPN (Sutedi, 2011). Hampir seluruh barang-barang kebutuhan hidup rakyat Indonesia merupakan hasil produksi yang atas penyerahannya terutang pajak pertambahan nilai, dengan kata lain semua transaksi atau penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak pada prinsipnya terutang pajak pertambahan nilai. Oleh karena itu pajak pertambahan nilai dikenakan setiap orang di dalam daerah pabean yang mengkonsumsi barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang menjadi objek pemungutan pajak pertambahan nilai, meskipun belum mempunyai nomor pokok wajib pajak (Lubis, 2016).

Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi di Indonesia juga mempunyai peran dalam memberikan sumbangan di penerimaan pajak Negara salah satunya sektor penerimaan pajak, terutama dari pajak pertambahan nilai. Hal ini dapat dilihat pada Grafik 1.1

Grafik 1.1
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015



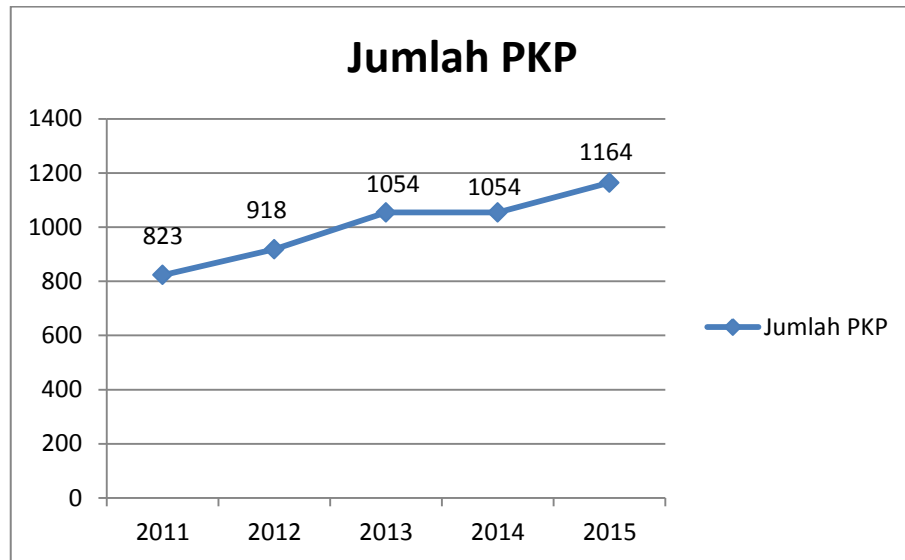
Sumber: Kanwil DJP Jawa Tengah II

Dari Grafik 1.1 terlihat bahwa penerimaan pajak pertambahan nilai Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan secara terus menerus selama tahun 2011-2015. Pada tahun 2011 penerimaan pajak pertambahan nilai sebesar 1.074.788.742.338 kemudian naik menjadi 1.500.841.346.849. Pada tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi 1.696.344.282.391, begitu seterusnya dengan tahun 2014 dan 2015 naik menjadi 2.188.392.105.633 dan 3.021.986.488.697.

Kegiatan konsumsi bagi negara berkembang seperti Indonesia merupakan salah satu kegiatan ekonomi utama yang dilakukan. Semakin bertambah kegiatan konsumsi masyarakat berarti akan berpengaruh kepada jumlah penerimaan PPN, maka dapat diasumsikan bahwa PPN mempunyai hubungan erat dengan kegiatan ekonomi (Renata et al, 2016). Masalah ekonomi makro yang dihadapi setiap Negara adalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Tingginya tingkat inflasi suatu negara akan membuat banyak usaha kecil yang bangkrut, melemahnya daya beli, dan meningkatnya jumlah pengangguran serta kemiskinan. Masalah ekonomi makro yang harus diperhatikan dalam proses pembangunan ekonomi selain inflasi adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nasional suatu Negara yang seringkali diukur melalui *Gross Domestic Product* (Damayanti et al, 2016).

Sedangkan untuk menjamin keberlangsungan penerimaan PPN dapat dipengaruhi oleh kebijakan dibidang perpajakan. Di Indonesia yang dimaksud dengan subyek PPN yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP wajib melaporkan usahanya dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang (Undang Undang No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah). Jumlah PKP dalam memungut, melaporkan dan menyetorkan PPN sangat diperlukan untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak. Hal tersebut dapat dilihat pada Grafik 1.2

Grafik 1.2
Jumlah Pengusaha Kena Pajak Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015



Sumber: Kanwil DJP Jawa Tengah II

Dari Grafik 1.2 terlihat bahwa jumlah pengusaha kena pajak Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan selama tahun 2011-2015. Pada tahun 2011 sebanyak 823 pengusaha, lalu mengalami kenaikan pada tahun 2012 menjadi 918. Tahun 2013 dan 2014 sebesar 1.054. Dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 1.164 pengusaha kena pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk meneliti tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai dalam skripsi berjudul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI JAWA TENGAH TAHUN 2011-2015 (Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di Jawa Tengah tahun 2011-2015?
2. Apakah inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di Jawa Tengah tahun 2011-2015?
3. Apakah jumlah pengusaha kena pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di Jawa Tengah tahun 2011-2015?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di Jawa Tengah tahun 2011-2015.
2. Untuk mengetahui apakah inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di Jawa Tengah tahun 2011-2015.
3. Untuk mengetahui apakah jumlah pengusaha kena pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di Jawa Tengah tahun 2011-2015.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian dapat memberikan rekomendasi atau masukan bagi pemerintah terutama di Jawa Tengah dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan hubungan pertumbuhan ekonomi, inflasi, jumlah pengusaha kena pajak dan penerimaan pajak pertambahan nilai.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini digunakan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama berada di perguruan tinggi, dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya, sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal khususnya.

E. Metode Analisis Data

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder meliputi periode 2011-2015 yang terdiri dari 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah meliputi variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi, sedangkan dari Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II meliputi variabel penerimaan pajak pertambahan nilai dan jumlah pengusaha kena pajak.

2. Alat dan Model Analisis

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai di Jawa Tengah. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis data panel.

Penelitian ini menganalisis hubungan antar variabel, yaitu variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun model dirumuskan replikasi dari jurnal Almira Herna Renata, Kadarisman Hidayat, Bayu Kaniskha (2016) yang berjudul “Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I)” sebagai berikut:

Model fungsional:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3)$$

Kemudian fungsi tersebut ditransformasikan ke dalam *multiple regression* sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Di mana:

Y	= Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
X ₁	= Inflasi
X ₂	= Nilai Tukar Rupiah
X ₃	= Jumlah Pengusaha Kena Pajak
α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien Regresi
e	= error term

Penulis disini mengemukakan modifikasi model dari replikasi model tersebut sebagai berikut:

$$\text{Log}(PPN)_{it} = \beta_0 + \beta_1 PE_{it} + \beta_2 INF_{it} + \beta_3 \text{Log}(PKP)_{it} + u_{it}$$

Di mana:

Log	= Logaritma
PPN	= Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai wilayah ke-i dan waktu ke-t
PE	= Pertumbuhan Ekonomi wilayah ke-i dan waktu ke-t
INF	= Inflasi wilayah ke-i dan waktu ke-t
PKP	= Jumlah Pengusaha Kena Pajak wilayah ke-i dan waktu ke-t
u	= Faktor gangguan atau tidak dapat diamati
i	= Menunjukkan kota/kabupaten
t	= Menunjukkan deret waktu 2011-2015
$\beta_{0,1,2,3}$	= Koefisien slope dan intersep

Data panel adalah gabungan antara data silang (*cross section*) dengan data runtut waktu (*time series*). Data runtut waktu merupakan data yang meliputi satu objek dengan beberapa periode waktu. Sedangkan data silang terdiri atas beberapa atau banyak objek dengan

beberapa jenis data. Metode yang ditawarkan oleh regresi data panel dapat dipilih dengan beberapa uji untuk menentukan manakah antara PLS, FEM, atau REM yang paling tepat. Uji yang digunakan antara lain:

a. Uji Chow

Pengujian Uji Chow dilakukan dengan hipotesis berikut:

H_0 : model mengikuti Common/Pooled

H_a : model mengikuti Fixed Effect

b. Uji Hausman

Pengujian Uji Hausman dilakukan dengan hipotesis berikut:

H_0 : model mengikuti Random Effect

H_a : model mengikuti Fixed Effect

c. Pengujian Hipotesis

a) Uji Statistik F

b) Koefisien Determinasi *Adjusted R-Square* (R^2)

c) Uji Validitas Pengaruh (Uji t)

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan umum mengenai teori-teori yang digunakan sebagai literatur dan landasan berpikir yang sesuai topik dari skripsi yang dapat membantu penelitian. Dalam bab ini juga dijelaskan kerangka pemikiran atas permasalahan yang diteliti.

3. BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, dan definisi operasional, metode analisis data serta estimasi model regresi dengan panel data.

4. BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai gambaran umum penelitian dan analisis data dan pembahasan dari hasil penelitian.

5. BAB V: PENUTUP

Bab ini menyajikan secara singkat kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN